

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin yang sering disebut dengan Kota Seribu Sungai merupakan salah satu kota dari 13 Kota/Kab di Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin jika dilihat secara geografis terletak antara 3° 16'46" sampai dengan 3° 22' 54" Lintang Selatan dan 114° 31' 40" sampai dengan 114° 39' 55" Bujur Timur.⁴⁹

Sesuai dengan julukannya Kota Banjarmasin terdapat banyak sekali anak sungai, sehingga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi maupun mata pencaharian. Kota Banjarmasin terbagi menjadi lima kecamatan yang terdiri dari Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Utara, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Barat.

B. Laporan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung terhadap Ketua PPDI Kota Banjarmasin dan Staff Pengolah Data Penempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Prov. Kalimantan Selatan. Dalam laporan penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut :

⁴⁹ Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, *Kota Banjarmasin Dalam Angka Banjarmasin Municipality in Figures 2022*, Hal 3.

1. Uraian Hasil Wawancara

1. Informan 1

1) Identitas Informan

Nama : ST
Pendidikan : SMPLB-A
Pekerjaan/Jabatan : Tenaga Pijat/Ketua Umum PPDI
Kota Banjarmasin
Alamat : Jl Belitung Darat Gg Demang No10
No. Hp : 08134844xxxx

2) Uraian Hasil Wawancara

Bapak ST atau kerap dipanggil S merupakan seorang Difabel Tuna Netra. Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai akses pekerjaan bagi difabel di Kota Banjarmasin, menurut beliau bahwa akses pekerjaan di Kota Banjarmasin belum begitu terbuka bagi difabel khususnya untuk swasta dan pemerintah, kecuali membuat usaha sendiri (wiraswasta) karena difabelnya yang membuka usaha untuk mereka berwirausaha atau bekerja.

Menurut pemaparan beliau, alasan khusus difabel tidak memperoleh akses pekerjaan adalah yang utama karena kondisi difabel tersebut. Meskipun difabelnya sendiri sudah lulus berkuliah dan menjadi sarjana seperti di UIN Antasari maupun ULM, tetapi ketika mereka mencari

pekerjaan kondisi seorang difabel itulah yang dipermasalahkan.

Faktor yang sangat mempengaruhi akses pekerjaan bagi difabel menurut beliau ada dua hal yakni infrastruktur dan pelayanan. Hal ini disebabkan Difabel mempunyai banyak jenis ragamnya, seperti yang menggunakan tongkat dua, tuna netra, kursi roda, tetapi sarana dan prasana di tempat tersebut tidaklah mendukung bagi difabel tersebut, sehingga tidak inklusi bagi difabel tersebut untuk bisa melamar maupun bekerja disana.

“Seorang Penyandang Disabilitas pengguna kursi roda tidak diterima dalam melamar pekerjaan karena infrastrukturnya tidak memadai.” Katanya.

Pelayanan yang kurang pun menjadikan sebuah faktor pengaruh bagi difabel untuk bisa memperoleh pekerjaan, seperti difabel yang ingin melamar tapi kesulitan untuk menuju tempatnya seharusnya dibantu bukan hanya dibiarkan, menanyakan terlebih dahulu kemampuan apa yang dimiliki difabel tersebut, bukan langsung menolaknya.

Menurut Bapak S bahwa persyaratan pekerjaan difabel belum bersifat inklusi, dan fasilitas penunjang saat proses penerimaan belum tersedia.

2. Informan 2

1) Identitas Informan

Nama : NH
Pendidikan : S1-Ekonomi
Pekerjaan/Jabatan : ASN Pengolah Data Penempatan
Tenaga Kerja DISNAKERTRANS
Prov. Kalimantan Selatan
Alamat : Jl. A.Yani Km. 6 No.23
No. Hp : 08135195xxxx

2) Uraian Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak NH yang kerap dipanggil dengan Bapak N mengenai akses pekerjaan bagi difabel.

Menurut pemaparan Bapak N, masalah yang menjadi alasan sehingga difabel tidak mudah untuk memperoleh pekerjaan adalah kondisi dari difabel tersebut.

Padahal kerap kali dari Dinas terutama saat adanya Bursa Kerja maupun *Job Fair* menyampaikan kepada para penyedia lapangan kerja, perusahaan – perusahaan untuk memberikan hak difabel, sebagaimana tertulis dalam Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas agar di perusahaan tersebut

mempekerjakan difabel sebanyak 1%-2% dari jumlah pegawai.

Namun hal tersebut kembali lagi ke perusahaan karena terkadang ada pihak yang mengadakan, tetapi ada juga yang tidak mengadakan penerimaan untuk difabel.

Faktor yang mempengaruhi akses pekerjaan bagi difabel menurut beliau adalah faktor di lapangan. Seperti yang kita ketahui bahwa difabel ini merupakan seseorang dengan kondisi khusus, karena terkadang dalam beberapa kondisi tubuhnya belum tentu selalu dapat bekerja optimal, sehingga harus ditempatkan atau bekerja sesuai dengan bidang yang mumpuni dengan kondisinya.

Terkadang perusahaan tersebut tidak selalu menempatkan pegawai dengan bidang atau pekerjaan yang sesuai dengan kondisi tubuh pegawai.

“Contoh kemarin ada seorang bapak, beliau difabel yang bekerja di In*****, dia seorang difabel cacat kaki, karena kaki beliau kehilangan satu kakinya. Dia bukan seorang yang harusnya berada di bagian gudang, tetapi dia dipekerjakan di gudang untuk mengangkat - angkat barang, sehingga membuat satu kakinya pun kena juga, karena akhirnya dia *resign* atau berhenti.” Katanya.

Sehingga dari bidang pengawasan melakukan peneguran ke perusahaan untuk tidak mempekerjakan difabel dalam bagian pekerjaan yang terlalu berat, disesuaikan dengan kondisi difabel tersebut. Dalam hal ini

terkadang data dengan dilapangan itu berbeda dan tidak sama.

Selain hal tersebut perlunya juga seseorang yang mampu dalam bahasa isyarat. Sehingga memudahkan difabel tunarungu atau tidak bisa mendengar dan difabel tunawicara atau tidak bisa berbicara untuk dapat berkomunikasi dengan baik. Maka dari itu sangat diperlukan setiap tempat memiliki ahli bahasa syarat (minimal mengerti), minimal satu orang.

Menurut beliau syarat – syarat bagi difabel disesuaikan dengan kondisi difabel dan juga kriteria dari perusahaan itu. Dalam hal ini beliau juga menjelaskan bahwa sepengetahuannya tidak ada persyaratan khusus bagi difabel, sama saja seperti dengan pendaftar umum lainnya.

Namun beliau menyarankan untuk setiap difabel memiliki sertifikat dari Balai Latihan Kerja, agar dapat diketahui dan dilatih dengan baik keahlian yang dimiliki oleh difabel tersebut.

Beliau mengatakan bahwa beliau kurang mengetahui proses penerimaan difabel di ASN maupun swasta.

2. Tabel Data Pekerja Penyandang Disabilitas

Gambar 4.1 Data Pekerja Difabel 1

FORMAT PELAPORAN
AKSI HAM 6 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022
B-08

1. Format Perusahaan BUMD Kabupaten/Kota				Jumlah Pekerja Penyandang Disabilitas	
No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Jumlah Total Pekerja/Pegawai (Permanen/Kontrak)	Jumlah Tidak Ada	Persentase Tidak Ada
1	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		
2					
3					
<i>Dst</i>					

2. Format Perusahaan Swasta				Jumlah Pekerja Penyandang Disabilitas	
No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Jumlah Total Pekerja/Pegawai (Permanen/Kontrak)	Jumlah	Persentase
1	PT. Trio Honda	Perdagangan	260 orang	4 orang	1%
2	PT. Tata Optima Property	Property dan Jasa	101 orang	2 orang	2%
3	Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar	Fesyen /Kerajinan Lokal	50 orang	6 orang	8%
4	Café California	Usaha/Dagang	10 orang	1 orang	1%

Keterangan : Sumber dari Arsip Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Gambar 4.2 Data Pekerja Difabel 2

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
 JL. PRAMUKA KOMPLEK MAN 2 TELP / FAX. (0511) 3250774, (0511) 3259992
 BANJARMASIN. KODE POS 70119

Banjarmasin, 13 April 2022

Nomor : 420/309/P3K/IV/2022
 Lampiran : -
 Perihal : Penyampaian Data Disabilitas

Kepada Yth
 Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
 Provinsi Kalimantan Selatan
 Di -
 Banjarmasin

Dengan ini kami sampaikan data penyandang disabilitas yang bekerja di perusahaan di Kota Banjarmasin.

NO	Nama Perusahaan	Nama Disabilitas	Jabatan	Ket
1.	Trio Honda	Andre	SPV HC3	
2.	Trio Honda	Najib Efandi	SPV IT	
3.	Trio Honda	Zailani	SPV HC3	
4.	Trio Honda	Nurachim Zair Haq	SPV Logistik	
5.	Café Clifornia	Atna Yanti	Juru Masak	
6.	Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar	Rini Hayati	Pelukis Motif Sasirangan	
7.	Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar	Gt.Nana Mardiana	Produksi Jelujur dan Manjahit	
8.	Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar	Bahriyani	Produksi Menjahit	
9.	Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar	Ferisco	Pelukis Motif Sasirangan	
10.	Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar	Yoga Pratama	Team Lapangan	
11.	Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar	Monalisa	Produksi bahan warna Alam	

Demikian kami sampaikan data penyandang disabilitas yang bekerja di Kota Banjarmasin atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas
 Kabin Pembinaan Pelatihan dan
 Pemangkuah Kerja
 Dinas Koperasi, Usaha
 Mikro dan Tenaga Kerja
 BANJARMASIN
 SRI MURNANI, SE, M.AP
 Pembina /IV a
 NIP. 19700419 199203 2 004

Keterangan : Sumber dari Arsip Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan

C. Analisis Data

1. Penerapan Akses Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Banjarmasin

a. Akses Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Banjarmasin

Kota Banjarmasin merupakan salah satu Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada 2021 terdapat penduduk dengan total jumlah 662.230 jiwa⁵⁰ yang tersebar dalam lima kecamatan, di antaranya terdapat penyandang disabilitas sebanyak 1.173 yang terdiri dari 914 penyandang disabilitas dan 259 anak dengan disabilitas.⁵¹

Jumlah penduduk yang padat tentu menimbulkan banyaknya para pencari kerja, tetapi lowongan kerja tidak seimbang dengan jumlah pencari kerja. Di tahun 2021, tercatat jumlah pencari kerja laki-laki sebanyak 1.141 dan perempuan sebanyak 715.⁵² Meski tercatat berapa banyak jumlah pencari kerja, tetapi tidak tercatat dengan jelas seberapa banyak jumlah pencari kerja pada penyandang disabilitas.

⁵⁰ Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, *Kota Banjarmasin Dalam Angka Banjarmasin Municipality in Figures 2022*, Hal 71.

⁵¹ Ibid., Hal 100.

⁵² Ibid., Hal 81.

Keadaan ini membuat akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas kurang memadai. Padahal aksesibilitas dalam pekerjaan sangatlah di perlukan, terutama bagi para penyandang disabilitas.

Pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah untuk menjamin kemandirian dan partisipasi mereka dalam segala bidang kehidupan di masyarakat. Apalagi Banjarmasin sebagai kota yang paling padat penduduknya wajib menjadi barometer dalam penanganan mengenai isu disabilitas. Untuk memberikan penjelasan yang lebih mudah dipahami maka peneliti mengkategorikan aksesibilitas dalam dua kategori yaitu, fasilitas dan transportasi sebagai aksesibilitas fisik dan pelayanan serta informasi sebagai aksesibilitas non fisik.

Secara umum, penerapan dan pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di kota Banjarmasin masih memprihatinkan. Faktor yang sangat mempengaruhi akses pekerjaan bagi difabel menurut hasil wawancara dari Bapak ST beliau mengatakan ada dua hal yakni infrastruktur dan pelayanan. Hal ini disebabkan Difabel mempunyai banyak jenis ragamnya, seperti yang menggunakan tongkat dua, tuna netra, kursi roda, tetapi sarana dan prasana di tempat tersebut tidaklah mendukung

bagi difabel tersebut, sehingga tidak inklusi bagi difabel tersebut untuk bisa melamar maupun bekerja disana.

“Seorang Penyandang Disabilitas pengguna kursi roda tidak diterima dalam melamar pekerjaan karena infrastrukturnya tidak memadai.” Katanya.

Pelayanan yang kurang pun menjadikan sebuah faktor pengaruh bagi difabel untuk bisa memperoleh pekerjaan, seperti difabel yang ingin melamar tapi kesulitan untuk menuju tempatnya seharusnya dibantu bukan hanya dibiarkan, menanyakan terlebih dahulu kemampuan apa yang dimiliki difabel tersebut, bukan langsung menolaknya.

Sebagaimana yang diterangkan diatas tentu aksesibilitas fisik di kota Banjarmasin memang telah mengalami peningkatan meskipun masih tidak sesuai yang diharapkan. Pembangunan terlihat dari jalan masuk ke dalam kantor pemerintahan misalnya, dimana bangunannya dibuat dengan dua jenis jalan masuk, yang pertama berbentuk tangga dan yang kedua berbentuk jalan miring yang pembangunannya disesuaikan dan tidak terlalu licin agar memudahkan dalam penggunaannya yang mana diperuntukan khusus bagi pengguna kursi roda. Belum lagi yang telah menjamurnya toilet khusus bagi penyandang disabilitas.

Bagaimanapun, diskursus aksesibilitas memiliki makna dan cakupan yang luas, yaitu bukan hanya terkait dengan bangunan/fasilitas publik, seperti pasar, gedung pemerintah, sarana transportasi, namun juga pada pelayanan publik secara umum, misalnya pelayanan kesehatan, pekerjaan, pendidikan, hukum dan lain-lain. Dalam tulisan ini, analisis mengenai aksesibilitas dikaitkan dengan aksesibilitas bangunan/lingkungan/transportasi dan aksesibilitas komunikasi/informasi. Lingkungan Dalam tulisan ini, secara spesifik, aksesibilitas bangunan, lingkungan dan transportasi dimasukkan dalam aksesibilitas fisik, sedangkan aksesibilitas informasi/komunikasi dan teknologi dikaitkan dengan aksesibilitas nonfisik.

b. Alasan Penyandang Disabilitas Tidak Memperoleh Akses Pekerjaan

Berdasarkan hasil wawancara bahwa alasan khusus difabel tidak memperoleh akses pekerjaan adalah yang utama karena kondisi difabel tersebut. Meskipun difabelnya sendiri sudah lulus berkuliah dan menjadi sarjana seperti di UIN Antasari maupun ULM, tetapi ketika mereka mencari pekerjaan kondisi seorang difabel itulah yang dipermasalahkan.

Menurut pemaparan Bapak N, masalah yang menjadi alasan sehingga difabel tidak mudah untuk memperoleh pekerjaan adalah kondisi dari difabel tersebut.

c. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Akses Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas

Faktor yang sangat mempengaruhi akses pekerjaan bagi difabel menurut beliau ada dua hal yakni infrastruktur dan pelayanan. Dalam hal ini infrastruktur yang dimaksud mengenai bangunan, sarana dan prasana yang menunjang bagi difabel. Seperti adanya jalan menurun yang sesuai bagi difabel, bukan hanya tangga. Karena hal ini dapat memudahkan bagi para difabel yang menggunakan kuris roda. Selain itu jika difabel bekerja, diharapkan ruangan tempat bekerjanya dapat di akses dengan mudah seperti dengan adanya lift/jalan menurun di dalam gedung/bangunan. Jika tidak adanya hal tersebut sebaiknya ruangan bagi difabel diletakkan di lantai satu atau dasar, sehingga memudahkan akses bagi difabel tersebut.

Pelayanan dalam hal ini adalah perlakuan yang seharusnya sama, bukan hanya bagi non difabel tetapi juga bagi difabelnya sendiri. Adanya bantuan jika mengalami kesusahan, pelayanan yang ramah.

Faktor yang mempengaruhi akses pekerjaan bagi difabel menurut beliau adalah faktor di lapangan. Seperti yang kita ketahui bahwa difabel ini merupakan seseorang dengan kondisi khusus, karena terkadang dalam beberapa kondisi tubuhnya belum tentu selalu dapat bekerja optimal, sehingga harus ditempatkan atau bekerja sesuai dengan bidang yang mumpuni dengan kondisinya.

d. Perspektif HAM

Dari beberapa data di atas, terlihat bahwa pemenuhan akses kerja bagi para penyandang disabilitas di Banjarmasin masih belum mencapai maksimal di mana masih terjadi diskriminasi pelayanan di banyak tempat, baik dalam aksesibilitas fisik maupun pelayanan yang sifatnya non fisik.

Dalam teori HAM, negara ialah pemangku kewajiban, sedangkan masyarakat ialah pemangku hak. Identifikasi pemangku kewajiban dan hak ini merupakan konsekuensi instrumen hukum, utamanya instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat/disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak

memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Ketidaktersediaan data pekerja penyandang disabilitas secara menyeluruh di Kota Banjarmasin mengisyaratkan bahwa perlakuan kekhususan yang seharusnya didapatkan malah tidak terpenuhi. Hemat peneliti, data pekerja non disabilitas saja ada dan dilakukan pendataan. Namun berbanding terbalik dengan data pekerja penyandang disabilitas yang sangat sulit dicari, terbukti dari hasil riset yang peneliti lakukan di instansi terkait.

Perlakuan berbeda inilah yang sungguh sangat disayangkan terjadi di Kota Banjarmasin yang padahal merupakan kota yang menjadi barometer di Kalimantan Selatan. Padahal, menurut UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5 ayat (4) Penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan Keadilan. Di mana salah satunya adalah akses pada ketersediaan informasi. Karena pada ruang inilah negara dapat membuktikan diri mereka hadir dan memberikan perlakuan khusus. Sehingga perlindungan yang diamanahkan dapat dijalankan dengan sedemikian rupa.